

PERAN MUHAMMADIYAH SEBAGAI CIVIL SOCIETY DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DI INDONESIA

Riza Anindya Nabila Putri ^{*1}
Muhammad Aulia Syahdanjani ²
Zeldi Januarif Akhtiar ³
Fasha Septia Putri ⁴
Zaidan Mauliddan ⁵
Andi Setiawan ⁶

^{1,2,3,4,5,6} Program Studi Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Brawijaya

*e-mail : rizaputri@student.ub.ac.id

Abstrak

Penelitian ini mengkaji peran Muhammadiyah sebagai organisasi civil society dalam penguatan demokrasi di Indonesia melalui pendekatan kualitatif berbasis studi literatur. Penelitian mengeksplorasi bagaimana Muhammadiyah, sejak didirikan pada 1912, berfungsi sebagai jaringan otonom di luar negara dan pasar, dengan kontribusi utama di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan sosial, serta advokasi kebijakan publik yang mendukung partisipasi masyarakat, toleransi, dan checks and balances terhadap kekuasaan. Tujuan utama adalah menggali peran dan kontribusi nyata Muhammadiyah dalam membangun masyarakat madani yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial, dengan manfaat teoritis untuk memperkaya kajian civil society berbasis Islam serta praktis bagi pemerintah dan masyarakat dalam optimalisasi kolaborasi.

Kata kunci: Muhammadiyah, civil society, demokrasi Indonesia, penguatan demokrasi, masyarakat madani, pemberdayaan sosial

Abstract

This research examines the role of Muhammadiyah as a civil society organization in strengthening democracy in Indonesia through a qualitative approach based on literature review. It explores how Muhammadiyah, since its founding in 1912, functions as an autonomous network outside the state and market, with major contributions in education, health, social empowerment, and public policy advocacy that support societal participation, tolerance, and checks and balances on power. The primary objective is to uncover Muhammadiyah's tangible role and contributions in building a democratic, inclusive, and socially just madani society, offering theoretical benefits to enrich studies on Islam-based civil society and practical value for government and communities in optimizing collaboration.

Keywords: Muhammadiyah, civil society, Indonesian democracy, democracy strengthening, madani society, social empowerment

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Dalam lingkup politik kontemporer, *civil society* menjadi pembahasan yang memerlukan perhatian yang luas bagi seluruh elemen masyarakat. *Civil society* merupakan sebuah konsep yang sangat luas. John A. Hall memberikan tiga pemaknaan terhadap *civil society*. Pertama, masyarakat sosial sebagai struktur sosial terorganisir yaitu masyarakat sipil dipandang sebagai jaringan organisasi dan institusi yang beroperasi di luar lingkup negara dan pasar. Hal ini mencakup berbagai kelompok seperti Organisasi Non-Pemerintah (LSM), serikat pekerja, komunitas lokal, dan asosiasi sukarela lainnya yang berfungsi sebagai mediator antara individu dan negara. Kedua, masyarakat sosial sebagai norma dan nilai yaitu masyarakat sipil sebagai gabungan norma, nilai, dan praktik yang memajukan solidaritas sosial, toleransi, dan kepercayaan antar individu dalam masyarakat. Nilai-nilai ini dianggap esensial untuk mendukung praktik demokrasi dan kohesi sosial. Ketiga, masyarakat sosial sebagai ruang publik yaitu masyarakat sipil diwujudkan sebagai arena dimana diskusi publik dan debat terjadi, hal ini memungkinkan warga negara untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi melalui dialog dan keterlibatan aktif dalam isu-isu publik (Hall, 1995). Selain itu, *civil society* juga dipahami sebagai ruang sosial yang terbentuk secara

otonom di luar kendali negara dan pasar, serta menjadi arena di mana warga dapat berpartisipasi aktif dalam kehidupan publik. Pemikiran mengenai masyarakat sipil sudah lama diperbincangkan oleh para teoritikus klasik seperti John Locke, Rousseau, dan Montesquieu, yang menekankan pentingnya ruang kebebasan bagi warga untuk berorganisasi tanpa intervensi kekuasaan negara. Dalam pandangan John A. Hall, *civil society* merupakan himpunan asosiasi dan organisasi yang berfungsi menyeimbangkan kekuasaan serta memperkuat demokrasi (Hall, 2013).

Dalam islam, *civil society* dikenal juga dengan nama Masyarakat Madani. Konsep ini pertama kali dicetuskan oleh Dato Seri Anwar Ibrahim dalam ceramahnya pada simposium Nasional dalam rangka forum ilmiah pada acara festival istiqlal, 26 September 1995 di Jakarta. Menurut Dato Seri Anwar Ibrahim, masyarakat madani merupakan sistem sosial yang subur yang berlandaskan pada prinsip moral yang menjamin keseimbangan dan keselarasan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat madani diartikan sebagai berkembangnya organisasi-organisasi otonom yang memfasilitasi berbagai kegiatan sosial, ekonomi, politik yang tertib (*civilized*). Walzer (1997) berpendapat "*only a democratic state can create a democratic civil society; only a democratic civil society can sustain a democratic state.*" *Civil society* yang dimaksud tentunya bebas dari pengaruh rezim sekaligus dapat memperjuangkan kepentingan umum (Beitinger-Lee, 2010:10). Keberadaan masyarakat madani diperlukan untuk menciptakan masyarakat *civilized* atau masyarakat yang berkeadaban, hal ini menjadi faktor pendukung bagi proses demokratisnya suatu masyarakat, tanpa masyarakat madani yang tertib dan teratur, akan sulit terwujudnya pemerintahan sipil yang demokratis (Jurdi, 2011).

Didirikan pada tahun 1912 oleh KH. Ahmad Dahlan di Yogyakarta, Muhammadiyah adalah salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Sejak awal berdirinya, selain fokus pada aspek keagamaan, Muhammadiyah juga memiliki komitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Muhammadiyah berusaha membuktikan perannya melalui sektor pemberdayaan sosial, pendidikan, dan kesehatan. Hal ini sebagai wujud dari perannya sebagai *civil society* yang ideal. Pada konteks masyarakat sipil di Indonesia, peran organisasi seperti Muhammadiyah menjadi sangat penting dalam mendorong transformasi sosial melalui pendidikan, kesehatan, dan politik. Organisasi ini sejak awal menempatkan diri sebagai kekuatan sosial yang menekankan pada pentingnya pendidikan, pelayanan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat. Muhammadiyah mengelola ribuan lembaga pendidikan mulai dari taman kanak-kanak hingga perguruan tinggi, serta ratusan rumah sakit dan klinik kesehatan yang tersebar di seluruh Indonesia. Model gerakan Muhammadiyah ini mengedepankan profesionalisme, independensi dari partai politik, serta kemandirian pendanaan, yang menjadi kekuatannya sebagai aktor *civil society* yang otonom dan berkelanjutan (Nakamura, 2012). Jika dibandingkan dengan organisasi seperti Nahdlatul Ulama (NU) yang juga berperan besar dalam ranah pendidikan, khususnya melalui jejaring pesantren dan pendidikan keagamaan tradisional. NU lebih banyak menekankan pada pelestarian nilai-nilai Islam tradisional dan budaya lokal sebagai basis pendidikan masyarakat. Hal ini karena NU memiliki basis massa yang sangat luas dan kuat terutama di pedesaan, serta memainkan peran penting dalam menjaga keberagaman, toleransi, dan nilai-nilai kearifan lokal. NU memiliki jaringan pesantren yang sangat luas, yang berfungsi sebagai pusat pendidikan agama serta pusat pemberdayaan ekonomi dan sosial. Selain itu, NU juga aktif dalam advokasi kebijakan publik melalui organisasi afiliasinya seperti Lakpesdam NU (Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia) yang bergerak dalam isu-isu demokrasi, HAM, dan penguatan masyarakat sipil (Fealy & Bush, 2014). Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa Muhammadiyah berfokus pada pembaruan pendidikan berbasis struktur kelembagaan modern, sementara NU memperkuat sistem pendidikan berbasis komunitas tradisional. Perbandingan antara Muhammadiyah dan NU sebagai organisasi *civil society* menunjukkan perbedaan pendekatan namun saling melengkapi. Muhammadiyah cenderung lebih sistematis dan terstruktur dalam pelayanan sosial berbasis kelembagaan modern, sedangkan NU lebih berbasis komunitas dan jaringan sosial tradisional. Keduanya berkontribusi besar dalam memperkuat demokrasi dan membentuk *public sphere* yang independen dari dominasi negara maupun kepentingan politik.

Selain itu, organisasi keagamaan lain seperti Al Irsyad Al Islamiyyah, Persatuan Islam (Persis), LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), dan bahkan organisasi lintas agama seperti KWI (Konferensi Waligereja Indonesia) dan PGI (Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia) juga berperan sebagai aktor *civil society*. Hal ini karena organisasi tersebut juga turut berperan dalam mengembangkan pendidikan berbasis nilai-nilai moral dan spiritual. Namun, dalam hal skala kelembagaan, kapasitas manajerial, dan jumlah lembaga pendidikan yang dikelola Muhammadiyah dapat dikatakan unggul di antara organisasi masyarakat sipil yang lain.

Kehadiran *civil society* menjadi penopang utama bagi demokratisasi karena di dalamnya terdapat kesadaran warga untuk berpartisipasi, mengkritisi kebijakan, serta mengontrol jalannya pemerintahan. Dalam konteks Indonesia, organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah menjadi representasi paling nyata dari kekuatan *civil society* yang tumbuh dan berakar kuat di tengah masyarakat. Sejak awal berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah telah menjadi pelopor gerakan sosial dan keagamaan yang tidak hanya berfokus pada dakwah, tetapi juga pada transformasi sosial melalui pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan masyarakat (Nashir, 2010).

Komitmen Muhammadiyah sebagai organisasi islam yang fokus pada bidang dakwah secara tegas dinyatakan sejak awal pendiriannya. Tetapi hal tersebut tidak berarti bahwa Muhammadiyah terlepas dari politik. Pada bidang politik, keterlibatan yang dilakukan oleh Muhammadiyah terutama untuk mendukung atau melancarkan gerakan dakwahnya. Berbagai gerakan yang dilakukan oleh Muhammadiyah kemudian menjadi bibit penguatan *civil society* hingga masyarakat madani mulai muncul. Di sini, mulai tampak kemampuan Muhammadiyah dalam mengambil jarak terhadap negara dan menjalankan fungsi serta peran penyeimbang sekaligus menempatkan diri sebagai pendukung atau suplementer bagi jalannya pemerintahan negara, karena ketika negara tidak mampu melaksanakan semua hal yang secara konstitusional telah menjadi tugasnya (Hikam, 1996).

Muhammadiyah menunjukkan bahwa gerakan Islam dapat berperan secara konstruktif dalam memperkuat demokrasi dan menciptakan masyarakat madani. Dalam pandangan Hefner (2000), model *civil* Islam yang dikembangkan Muhammadiyah menjadi bukti bahwa nilai-nilai Islam dapat berjalan seiring dengan prinsip demokrasi. Organisasi ini telah berhasil membangun basis sosial yang luas, menciptakan kesadaran politik warga, dan berkontribusi pada stabilitas pemerintahan melalui jalur pendidikan politik, advokasi kebijakan publik, serta kegiatan sosial yang berorientasi pada kemaslahatan bersama (Prasetyo & Etwina, 2024).

Kontribusi teoritis dari penelitian ini memiliki nilai strategis yang tinggi dalam memperluas wacana mengenai *civil society* berbasis Islam yang kompatibel dengan nilai-nilai demokrasi, khususnya dalam konteks global dan nasional. Dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai studi kasus utama, penelitian ini tidak hanya memperkuat kerangka teoritis tentang *civil society*, tetapi juga menegaskan bahwa organisasi keagamaan mampu menjadi aktor utama dalam mendorong transformasi demokratis secara substantif. Penelitian ini dengan tegas menyatakan bahwa peran Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan bukan hanya sebatas pada aspek spiritual, tetapi juga sebagai entitas yang aktif dan strategis dalam mendukung memperkuat demokrasi di Indonesia. Muhammadiyah berfungsi sebagai contoh nyata dalam menunjukkan bahwa organisasi berbasis agama dapat memainkan peran vital dalam mendorong partisipasi aktif masyarakat, mendidik publik mengenai hak-hak demokratis, mengadvokasi keadilan sosial, dan pendidikan politik. Penelitian ini tidak hanya menambah pemahaman akademis mengenai dinamika *civil society* di negara dengan mayoritas Muslim, tetapi juga menawarkan model yang relevan bagi negara-negara lain dalam menghadapi tantangan demokratisasi terutama mengenai model demokrasi berbasis nilai-nilai lokal dan spiritual. Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai relevansi gerakan Muhammadiyah dalam konteks demokrasi modern yang semakin kompleks dan dinamis.

KERANGKA TEORI & KAJIAN PUSTAKA

Landasan Teori

Teori *civil society* menurut John A. Hall (1995) mengacu pada berbagai asosiasi, kelompok, dan organisasi yang berada di luar lingkup negara dan sektor pasar yang berperan dalam mengawasi kekuasaan dan mendorong demokratisasi. Dalam pandangan Hall, *civil society* adalah ruang lingkup di mana masyarakat dapat mengorganisasikan diri secara bebas, tanpa dominasi dari negara atau kepentingan ekonomi tertentu. Kemudian Cohen dan Arato (1992) mendefinisikan *civil society* sebagai wilayah interaksi yang di dalamnya mencakup semua kelompok sosial paling akrab (khususnya keluarga), asosiasi (terutama yang bersifat sukarela), gerakan kemasyarakatan, dan berbagai wadah komunikasi publik lainnya yang diciptakan melalui bentuk-bentuk pengaturan serta mobilisasi diri secara independen baik dalam hal kelembagaan maupun kegiatan (Hadi, 2010). Menurut Robert Hefner (2000) dalam *civil society* berbasis Islam memiliki peran sebagai instrumental dalam pengembangan *civil society* Islam yang kompatibel dengan demokrasi sehingga Indonesia sukses dalam transisi dari otoritarianisme ke demokrasi. Menurut Muhammad AS Hikam, *civil society* adalah wilayah kehidupan sosial yang terorganisir, ditandai dengan partisipasi aktif, pluralitas, dan kesukarelaan yang bertujuan membangun budaya demokrasi. Dalam praktiknya, *civil society* berperan sebagai pengawasan, pembanding, serta penyeimbang bagi kekuasaan negara, guna memastikan tata kelola yang demokratis dan adil.

Teori *civil society* menjadi relevan dalam penelitian ini karena membantu menjelaskan dan memahami bagaimana Muhammadiyah bukan hanya berperan sebagai gerakan sosial, tetapi juga sebagai agen perubahan dalam proses demokratisasi di Indonesia. Dalam konteks demokrasi Indonesia, Muhammadiyah telah menunjukkan perannya dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, mengkritisi kebijakan yang tidak adil, dan memberikan alternatif solusi bagi permasalahan sosial yang dihadapi bangsa. Relevansi teori ini memperkaya kajian demokrasi dengan memadukan nilai-nilai lokal dan agama dalam praktik penguatan demokrasi yang inklusif dan berkelanjutan. Penelitian ini juga mengembangkan analisis dengan menegaskan bagaimana elemen-elemen teori *civil society* tersebut tercermin dalam tindakan konkrit Muhammadiyah, terutama dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendidikan dan pelayanan sosial. Muhammadiyah berperan aktif dalam menyediakan ruang publik partisipatif, mendorong partisipasi masyarakat dalam politik lokal dan nasional, serta berfungsi sebagai penyeimbang kekuasaan yang menegakkan prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Tinjauan Pustaka

Penelitian mengenai peran Muhammadiyah sebagai *civil society* dan agen perubahan demokrasi sudah dilakukan oleh banyak akademisi. Pada banyak penelitian yang sudah dilakukan terdapat suatu kesamaan dimana Muhammadiyah dinilai sebagai kekuatan *civil society* yang berperan dalam pembangunan sosial, pendidikan, dan advokasi kebijakan publik di Indonesia, selain itu beberapa penelitian juga menyoroti aspek demokrasi dan reformasi Islam dalam gerakan Muhammadiyah.

Muhammadiyah sebagai salah satu kekuatan utama *civil society* di Indonesia, berperan dalam penguatan demokrasi, harmoni sosial, dan pembangunan tata kelola pemerintahan yang transparan. Menurut Prasetyo & Etwina (2024), dalam jurnal yang berjudul "*Kontribusi Muhammadiyah Dalam Penguatan Demokrasi Dan Stabilitas Pemerintahan Di Indonesia.*" menemukan bahwa Muhammadiyah memperkuat demokrasi dan stabilitas pemerintahan lewat pendidikan politik warga, advokasi kebijakan publik, prinsip moderasi, serta peran sebagai mediator dan penjaga netralitas organisasi pada isu politik praktis. Muhammadiyah sebagai organisasi Islam terbesar di Indonesia, berperan sangat strategis dalam memperkuat praktik demokrasi melalui tiga pilar utama yaitu pendidikan politik, penguatan masyarakat sipil, dan advokasi kebijakan publik. Pendidikan politik yang dilakukan Muhammadiyah membekali masyarakat, khususnya anggota dan simpatisan, dengan pemahaman tentang hak dan kewajiban warga negara serta pentingnya partisipasi aktif dalam demokrasi. Penguatan *civil society* diwujudkan lewat organisasi yang independen, pelatihan kader, penyebaran nilai moderasi, dan peningkatan literasi demokrasi. Advokasi kebijakan publik yang dilakukan Muhammadiyah juga terbukti efektif dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*),

menegakkan transparansi, dan memastikan bahwa kebijakan publik tetap berpihak pada kepentingan masyarakat luas. Selain itu, Muhammadiyah dinilai berhasil menjadi mediator dalam konflik sosial dan penjaga nilai-nilai moderasi di masyarakat. Prinsip moderasi dan netralitas yang diusung Muhammadiyah memungkinkan organisasi ini untuk menyeimbangkan antara kritik konstruktif terhadap pemerintah dan kolaborasi dalam program-program pembangunan nasional. Dengan menjaga harmoni sosial dan tata nilai yang inklusif, Muhammadiyah berkontribusi besar terhadap terciptanya stabilitas pemerintahan di tengah dinamika politik Indonesia. Teori *civil society* memberi landasan bahwa organisasi sosial semestinya berperan aktif dalam menumbuhkan ruang-ruang partisipatif, menjaga keberlanjutan tata kelola pemerintahan demokratis, dan mengadvokasi perubahan sosial.

Berdasarkan penelitian Umar Abdul Jabbar (2007) dalam skripsinya yang berjudul "*Peran Muhammadiyah dalam Pemberdayaan Civil Society Pasca Reformasi*", Muhammadiyah sebagai salah satu gerakan Islam yang berperan dalam perkembangan sosial dan keagamaan di Indonesia. Sejak awal berdirinya, organisasi ini telah berfokus pada upaya membangun masyarakat Islami dan mandiri melalui dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Muhammadiyah menjadi pelopor dalam berbagai gerakan sosial dan tetap konsisten dalam bidang pendidikan, kesehatan, serta advokasi sosial. Konsep *civil society* yang mulai populer sejak tahun 1990-an, dianggap sebagai elemen kunci dalam demokrasi. Dalam konteks ini, Muhammadiyah mengambil peran sebagai agen perubahan yang aktif dalam pendidikan politik dan kewarganegaraan, mendorong masyarakat untuk tidak bergantung sepenuhnya pada negara. Perjalanan Muhammadiyah dalam memperjuangkan masyarakat mandiri dapat dilihat dari berbagai fase yang telah dilewatinya, mulai dari tahap religius kultural, religius struktural, hingga setelah *Khittah* 1971. Khususnya dalam era reformasi, terjadi perbedaan signifikan antara peran individu dan peran institusional Muhammadiyah dalam memperkuat *civil society*. Organisasi ini telah berpegang pada prinsip amar ma'ruf nahi munkar dalam memberdayakan masyarakat, baik dalam aspek agama, pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial. Hal ini menjadikan Muhammadiyah sebagai contoh nyata mengenai bagaimana peran sosial dan keagamaan dapat berjalan seiring untuk mewujudkan masyarakat yang mandiri, berdaya, dan memiliki kepribadian Muslim.

Dalam penelitian Gili Argenti (2017) berjudul "*Civil Society dan Politik Moral Muhammadiyah*", Muhammadiyah diposisikan sebagai salah satu kekuatan utama *civil society* di Indonesia yang menjalankan peran penting dalam membangun tatanan sosial berdasarkan nilai-nilai Islam dan mortalitas publik. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah menjalankan peran penting sebagai *civil society* dalam politik nasional pasca reformasi, meskipun tetap berpegang pada politik moral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Peran ini tercermin dalam beberapa aspek utama. Pertama, Muhammadiyah aktif dalam memberikan kontribusi terhadap proses legislasi di DPR RI, seperti dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Anti Pornografi dan Pornoaksi (APP). Selain itu organisasi ini turut berperan dalam penyelesaian konflik di berbagai daerah, seperti Aceh, Ambon, Poso, dan Papua. Muhammadiyah mengadakan dialog langsung dengan elit lokal untuk memahami akar masalah dan merumuskan solusi berbasis keadilan dan perdamaian. Kedua, Muhammadiyah berperan sebagai penyeimbang kekuasaan dengan menjalankan fungsi kontrol terhadap pemerintahan. Salah satu kontribusinya adalah memelopori gerakan moral anti korupsi melalui kampanye *Jihad Melawan Korupsi*. Dalam konflik yang terjadi antara KPK dan Kepolisian, Muhammadiyah bersama elemen *civil society* lainnya memberikan dukungan moral kepada KPK yang dianggap mengalami kriminalisasi. Selain itu, Muhammadiyah juga melakukan uji materi terhadap berbagai undang-undang yang dinilai dapat merugikan kekayaan alam Indonesia dan turut serta dalam kritik terhadap pemerintahan SBY-Boediono melalui pernyataan bersama dengan tokoh lintas agama. Ketiga, Muhammadiyah menyalurkan aspirasinya melalui berbagai media baik cetak, online, maupun elektronik, serta menggunakan jalur konstitusional seperti Mahkamah Konstitusi untuk mengajukan uji materi terhadap undang-undang tertentu. Selain itu, Muhammadiyah juga aktif dalam konferensi pers bersama kekuatan *civil society* lainnya guna menyuarakan pandangan dan kritik terhadap kebijakan pemerintah. Dengan peran-peran

tersebut, Muhammadiyah tetap konsisten sebagai kekuatan moral dalam demokrasi Indonesia, menjaga keseimbangan antara nilai-nilai Islam dan prinsip *civil society*.

Pada sumber lainnya, terdapat jurnal penelitian yang ditulis oleh (Muhsi, Asmika, dan Nurzannah, 2025) dengan judul "*Muhammadiyah dan Pelayanan Sosial di Bidang Kesehatan dan Sosial Kemasyarakatan*". Penelitian ini menyoroti peran Muhammadiyah dalam pelaksanaan dakwah melalui berbagai program yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam bidang kesehatan dan sosial kemasyarakatan. Dengan menggunakan pendekatan studi kepustakaan, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber akademik seperti buku, jurnal, dan dokumen terkait. Teknik analisis yang digunakan cukup reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memahami kontribusi Muhammadiyah secara lebih mendalam. Hal penelitian menunjukkan jika Muhammadiyah telah berperan secara strategis dalam pelayanan sosial dan kesehatan di Indonesia selama lebih dari satu abad. Berdasarkan nilai-nilai Islam, terutama teologi *al-Ma'un*, organisasi ini menggabungkan dakwah dengan aksi nyata melalui berbagai amal usaha, seperti pendirian rumah sakit, klinik, panti asuhan, serta program pemberdayaan masyarakat. Gerakan ini dilakukan Muhammadiyah tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat marginal tetapi juga berkontribusi terhadap pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs). Hal ini tercermin dalam upaya Muhammadiyah untuk mengentaskan kemiskinan, memperluas akses terhadap pelayanan kesehatan, serta meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di daerah terpencil.

Kemudian dalam tulisan Syarifuddin Jurdi (2011) dengan judul "*Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani*" membahas peran strategis Muhammadiyah sebagai salah satu organisasi masyarakat sipil di Indonesia. Muhammadiyah dianggap sebagai salah satu kekuatan utama dalam membangun kultur madani, yang mengacu pada masyarakat yang beradab dan berkeadilan. Penulis, Syarifuddin Jurdi, mengkaji sejarah dan perkembangan organisasi ini, menunjukkan bahwa sejak awal berdiri, Muhammadiyah telah merumuskan berbagai doktrin dan prinsip (*khittah*) untuk membantu memberdayakan masyarakat dalam berbagai bidang, termasuk sosial, pendidikan, dan politik. Misi utama Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan keadilan sosial dan mempromosikan kemandirian masyarakat. Ini mencerminkan komitmen mereka untuk meningkatkan kualitas hidup umat dan memperkuat basis masyarakat. Namun, tulisan ini juga menyentuh tantangan yang dihadapi oleh Muhammadiyah, terutama dalam hal menjaga independensinya dari pengaruh dan kekuasaan negara. Dalam sistem politik yang sering kali bersifat represif, posisi Muhammadiyah sebagai organisasi keagamaan yang tidak hanya terbatas pada aspek keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial yang kritis dan dapat berkontribusi pada perubahan sosial.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Alya Aqilla dan rekan-rekannya (2025) dengan judul "*Muhammadiyah Sebagai Pelopor Gerakan Sosial dan Pendidikan di Indonesia*", dibahas secara mendalam kontribusi penting Muhammadiyah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pendidikan dan kegiatan sosial. Sejak berdirinya pada tahun 1912, Muhammadiyah telah mendirikan lebih dari 17.000 institusi pendidikan yang membuka akses terhadap pendidikan berkualitas bagi berbagai kalangan. Di samping itu, organisasi ini juga aktif menjalankan berbagai inisiatif sosial, seperti pemberdayaan ekonomi, penanggulangan bencana, dan advokasi hak asasi manusia, yang menunjukkan komitmen kuat terhadap nilai-nilai keadilan sosial. Pendidikan yang ditawarkan Muhammadiyah tidak hanya berfokus pada aspek keilmuan, tetapi juga pada pembentukan karakter dan kepemimpinan generasi muda yang berorientasi pada kepedulian sosial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menganalisis peran Muhammadiyah dalam konteks gerakan sosial dan pendidikan di Indonesia. Temuan penelitian mengungkapkan bahwa Muhammadiyah tidak semata-mata merupakan organisasi keagamaan, melainkan juga agen perubahan sosial yang aktif dalam menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dengan demikian, studi ini memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman mengenai peran Muhammadiyah dalam masyarakat sipil, terutama dalam bidang pendidikan dan pemberdayaan

sosial, serta menghadirkan perspektif baru tentang relevansi gerakannya dalam menjawab tantangan sosial kontemporer.

Meskipun demikian, penelitian-penelitian tersebut cenderung melihat peran Muhammadiyah secara parsial baik dari aspek sosial, pendidikan, atau politiknya saja. Penelitian ini mengambil pendekatan yang lebih komprehensif dengan menjadikan Muhammadiyah sebagai studi kasus utama *civil society* berbasis Islam yang secara sistematis bertransformasi dari gerakan sosial menjadi agen perubahan demokrasi di Indonesia. Hal ini sekaligus menyoroti interoperabilitas nilai-nilai agama dan demokrasi yang selama ini kurang digali secara mendalam. Kebaruan riset ini terletak pada penggabungan perspektif teoritis dan empiris yang mendalam untuk menunjukkan bagaimana Muhammadiyah bukan saja sebagai entitas keagamaan, tetapi juga sebagai aktor sosial-politik progresif yang berperan aktif dalam demokratisasi melalui berbagai mekanisme partisipasi masyarakat, pendidikan politik, dan advokasi kebijakan yang efektif. Studi ini juga menempatkan Muhammadiyah dalam konteks dinamika politik kontemporer Indonesia yang semakin kompleks, sehingga memberikan kontribusi strategis terhadap kerangka teori *civil society* khususnya dalam konteks negara mayoritas Muslim.

METODOLOGI PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan metode studi literatur. Studi literatur merupakan metode yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi dengan mengkaji berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian baik menggunakan buku, jurnal, artikel, laporan, dokumen resmi, dan sumber-sumber digital, dalam hal ini yang berkaitan dengan konteks demokrasi mengenai peran Muhammadiyah sebagai *civil society* di Indonesia. Menurut Sugiyono (2018), studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan menginterpretasikan konsep yang relevan secara sistematis, hal ini guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian. Penggunaan kajian literatur bertujuan memperkaya wawasan penulis mengenai topik yang diteliti, sekaligus membantu dalam menentukan teori dan metode yang tepat digunakan. Dalam penelitian ini, metode studi literatur digunakan untuk menggali dan menjelaskan peran Muhammadiyah sebagai *civil society* dalam penguatan demokrasi di Indonesia.

Meski demikian, perlu disadari bahwa penggunaan metode studi literatur memiliki beberapa keterbatasan yang perlu dipertimbangkan secara kritis dalam proses penelitian. Pertama, keterbatasan data empiris menjadi tantangan utama. Karena tidak melibatkan observasi lapangan atau wawancara langsung, peneliti bergantung pada sumber sekunder yang tersedia. Hal ini berpotensi menimbulkan bias interpretasi atau kurangnya konteks aktual yang tidak bisa dihindari. Kedua, validitas dan relevansi sumber juga menjadi tantangan tersendiri, terutama dalam menyeleksi sumber yang benar-benar kredibel dan sesuai dengan kebutuhan analisis. Tidak semua literatur memiliki kualitas yang setara, sehingga peneliti perlu melakukan seleksi secara cermat agar tidak menggunakan data yang tidak valid. Ketiga, studi literatur juga memiliki keterbatasan dalam menangkap dinamika sosial yang terus berkembang dan secara *real time*, terutama dalam isu-isu sosial-politik kontemporer khususnya yang berkaitan dengan peran Muhammadiyah dimana terus berkembang secara dinamis. Dengan tidak adanya data lapangan, penelitian ini mungkin tidak sepenuhnya merepresentasikan perubahan-perubahan aktual yang terjadi dalam praktik. Keempat, risiko plagiarisme tidak langsung dapat terjadi apabila peneliti tidak secara hati-hati melakukan parafrase dan pencantuman sumber rujukan. Dalam studi literatur, integrasi akademik harus dijaga melalui pencatatan sumber yang tepat dan akurat. Oleh karena itu, penting bagi peneliti untuk mampu merepresentasikan perubahan dan perkembangan tersebut secara akurat melalui analisis yang mendalam dan kontekstual. Dengan demikian, hasil penelitian yang diperoleh tetap relevan, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder. Menurut Sugiyono, data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti atau pengumpul data secara tidak langsung (Sugiyono, 2008). Dengan kata lain, data sekunder merupakan sumber-sumber referensi yang telah tersedia dari beberapa jenis penelitian yang diperoleh melalui media atau dilakukan, diolah, serta dicatat oleh orang lain (Indrianto, Nur, dan Bambang Supomo, 2013:143). Terdapat beberapa sumber pada data sekunder yaitu melalui dokumen resmi, laporan penelitian, buku, jurnal, dokumentasi, dan lainnya. Penelitian ini menggunakan sumber data sekunder yang mencakup berbagai laporan, dokumen, artikel, dan jurnal yang mengulas peran Muhammadiyah dalam bidang sosial, pendidikan, kesehatan, dan politik. Termasuk di dalamnya adalah dokumen resmi Muhammadiyah, seperti Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART), publikasi resmi Muhammadiyah, serta laporan-laporan organisasi yang berkaitan dengan perannya sebagai *civil society*. Sumber data sekunder lain yang digunakan dalam penelitian ini juga mencakup jurnal dan buku yang membahas mengenai *civil society*, demokrasi, serta keterkaitan antara keduanya.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah utama dalam suatu penelitian, karena tahap ini berfungsi untuk memperoleh informasi dan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Hal ini selaras dengan pendapat Sugiyono (2013:224), teknik pengumpulan data adalah langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Sebab tanpa data, penelitian tidak akan memiliki dasar yang kuat untuk dilakukan. Oleh karena itu, teknik pengumpulan data berkaitan erat dan harus disesuaikan dengan rumusan masalah dan tujuan yang ingin dipecahkan. Masalah penelitian akan memberikan arah sekaligus memengaruhi metode yang digunakan untuk mengumpulkan data. Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang diterapkan adalah sebagai berikut:

Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data dimana dilakukan dari berbagai sumber atau daftar pustaka sebagai referensinya yang relevan dan berkaitan dengan masalah yang akan dibahas. Teknik ini digunakan untuk mengumpulkan data dan informasi melalui penelaahan berbagai sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data dikumpulkan dari buku, jurnal, artikel ilmiah, laporan penelitian, dokumen resmi, sumber digital, teori-teori dari para ahli yang membahas tentang *civil society*, peran Muhammadiyah sebagai *civil society*, serta demokrasi di Indonesia. Menurut Sugiyono (2018), studi pustaka ini efektif memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi, menganalisis, serta menginterpretasikan konsep-konsep yang relevan secara sistematis dalam memperkaya landasan teori penelitian.

Dokumentasi (*Documentation*)

Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang tertulis. Metode ini digunakan untuk menelusuri data historis. Menurut Sugiyono, Dokumen adalah catatan yang sudah berlalu. Hal tersebut bisa berupa tulisan, gambar, atau karya monumental orang lain (Sugiyono, 2013). Dalam artian lain, dokumentasi merupakan salah satu metode yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang dikumpulkan melalui pencatatan data yang sudah ada sebelumnya. Berbeda dengan studi literatur yang mengandalkan sumber pustaka berbasis catatan, metode dokumentasi memiliki lebih banyak sumbernya. Sumber dokumentasi dapat berupa arsip, foto, video, bahkan rekaman wawancara. Teknik ini dilakukan dengan mengumpulkan dan mengkaji berbagai dokumen tertulis yang berkaitan dengan peran Muhammadiyah sebagai *civil society* terutama dalam memperkuat demokrasi di Indonesia. Sumber data dokumentasi meliputi dokumen resmi Muhammadiyah, publikasi resmi, jurnal-jurnal, dan berbagai catatan atau dokumen yang dikeluarkan oleh organisasi ini. Dokumentasi ini juga mencakup berbagai sumber sekunder seperti laporan penelitian terdahulu, artikel, serta dokumen historis yang relevan.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan tahap penting dalam penelitian yang bertujuan untuk mengolah, menafsirkan, dan menarik kesimpulan dari data yang telah diperoleh. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak hanya dilakukan setelah seluruh data terkumpul, tetapi juga berlangsung secara terus-menerus sepanjang proses penelitian. Artinya, peneliti mulai menganalisis sejak tahap pengumpulan data hingga penyusunan hasil akhir penelitian. Menurut Matthew B. Miles dan Michael Huberman (1994), analisis data kualitatif mencakup tiga proses utama, yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan penarikan kesimpulan dan verifikasi (*conclusion drawing/verification*). Ketiga proses ini saling berkaitan dan berlangsung secara interaktif, sehingga membentuk alur analisis yang sistematis.

Reduksi Data (*Data Reduction*)

Reduksi data adalah proses merangkum, menyederhanakan, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dan kemudian dicari tema dan polanya (Sirajuddin Saleh, 2017). Data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah penelitian guna mengumpulkan data selanjutnya. Pada tahap ini, peneliti menyeleksi menyederhanakan dan memfokuskan data yang relevan dengan tujuan penelitian. Dalam konteks studi literatur ini, reduksi data dilakukan dengan cara memilah sumber-sumber tertulis yang berkaitan dengan peran Muhammadiyah sebagai *civil society* dalam penguatan demokrasi di Indonesia, serta menyingkirkan data yang kurang relevan. Proses ini membantu peneliti untuk memusatkan perhatian pada informasi yang benar-benar mendukung analisis dan pembahasan penelitian.

Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya adalah menyajikannya dalam bentuk yang mudah dipahami. Penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, pictogram, melalui uraian naratif, tabel, atau bagan konseptual yang menggambarkan hubungan antar konsep atau temuan utama dari hasil kajian literatur. Menurut Miles dan Huberman (2014), penyajian data yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Selain menggunakan teks yang naratif, penyajian data dapat berupa matrik, *network*, dan chart. Penyajian data dalam penelitian ini mencakup paparan mengenai teori *civil society*, peran Muhammadiyah dalam bidang sosial dan politik, serta keterkaitannya dengan proses demokratisasi di Indonesia. Tujuan dari tahap ini adalah pengelompokan untuk mempermudah peneliti dalam melihat pola, hubungan, dan makna yang muncul dari data yang telah dikumpulkan. Pengelompokan data dilakukan juga untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai hubungan konsep-konsep tersebut.

Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing/Verification*)

Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan. Peneliti menafsirkan makna data, mengaitkannya dengan teori-teori yang relevan, serta menjawab rumusan masalah penelitian. Proses verifikasi dilakukan dengan meninjau kembali data dan literatur untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil bersifat valid, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

Dalam penelitian ini, teknik analisis data digunakan untuk memahami bagaimana peran Muhammadiyah sebagai *civil society* berkontribusi terhadap penguatan demokrasi di Indonesia. Analisis dilakukan dengan cara menelaah keterkaitan antara teori *civil society*, konsep demokrasi, dan data empiris dari berbagai sumber literatur yang telah dikumpulkan. Melalui pendekatan ini, peneliti berusaha menafsirkan peran dan posisi Muhammadiyah secara lengkap, baik dari sisi ideologis, sosial, maupun politik. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai kontribusi Muhammadiyah dalam membangun masyarakat sipil yang mandiri, partisipatif, dan berdaya dalam sistem demokrasi Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemaparan Hasil Pembahasan

Peran Muhammadiyah sebagai Organisasi Civil Society dalam Konteks Demokrasi di Indonesia

Muhammadiyah merupakan salah satu organisasi islam masyarakat sipil (*civil society*) di Indonesia yang berperan dalam memperkuat kualitas demokrasi. Dalam mengenai teori politik, *civil society* dipahami sebagai ruang kehidupan sosial yang terorganisir di luar negara dan pasar, bersifat sukarela, mandiri, dan berorientasi pada kepentingan publik serta pengawasan kekuasaan. *Civil society* yang kuat dianggap penting bagi demokrasi karena mampu menjadi penyeimbang pemerintah, membela hak warga, dan mendorong kebijakan yang lebih responsif (Asrida, [et.al.](#),2021).

Sejak awal berdirinya Muhammadiyah perannya hadir sebagai gerakan pembaruan Islam yang bergerak dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial, sehingga menjadi kekuatan masyarakat sipil yang mandiri dari negara. Dengan pengelola sekolah, universitas, rumah sakit dan berbagai lembaga lainnya, Muhammadiyah mampu menjalankan fungsi pelayanan publik yang mana seharusnya menjadi bagian tugas negara dan memperkuat kemandirian masyarakat. Sebagai kekuatan *civil society* tentunya Muhammadiyah membangun jaringan organisasi yang aktif dan mandiri, sehingga terciptanya ruang publik bagi warga untuk dapat berdialog, berorganisasi dan menyampaikan aspirasinya dalam kepentingan publik. Melalui Jaringan formal maupun informal menjadikan Muhammadiyah membentuk masyarakat yang menjunjung demokrasi, kesukarelaan, serta keseimbangan hubungan antara negara dan warga (Setiadi, 2021).

Dalam perjalanan demokrasi Indonesia, kehadiran organisasi *civil society* menjadi faktor penentu dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan negara dan partisipasi masyarakat. Peran mengenai Muhammadiyah sebagai *civil society* dalam konteks demokrasi di Indonesia, menjadikan kekuatan sosial dan keagamaan dalam mendidik masyarakat, mengontrol jalannya pemerintahan, dan menjadi mitra dalam pembangunan politik yang moderat dan inklusif (Sugeng&Zayyati, 2024).

Salah satunya penelitian menurut (Rifai&Jubaidi,2022), Muhammadiyah dipandang turut mengembangkan partisipasi politik masyarakat, terutama dengan mendorong kesadaran hak dan kewajiban warga, pentingnya pemilu, serta perlunya mengawasi jalannya pemerintahan. Pendidikan politik ini umumnya dibingkai dalam narasi Islam berkemajuan dan kebangsaan, sehingga demokrasi diposisikan selaras dengan nilai keislaman dan keindonesiaan, bukan sebagai konsep Barat yang asing. Selain itu dalam pendidikan, Muhammadiyah telah berperan penting dalam perkembangan pendidikan nasional. Peran ini dilandaskan pada prinsip Islam sebagai rahmatan lil-'alamin, yang dimaknai oleh Muhammadiyah sebagai agama yang menjadi sumber petunjuk dan rahmat bagi seluruh umat manusia demi terwujudnya masyarakat Islam sejati. Untuk merealisasikan visi tersebut, pendidikan dijadikan salah satu jalur utama oleh Muhammadiyah.. Dengan demikian, visi dan misi pendidikan Muhammadiyah tentunya harus selalu sejalan dan berorientasi pada maksud dan tujuan pendidikan Muhammadiyah sendiri (Rusydi, 2016). Selain jumlah institusi yang dikelola, keberhasilan Muhammadiyah dalam mengembangkan pendidikan juga terlihat pada kualitas pembelajaran yang diterapkan. Muhammadiyah berkomitmen untuk mengintegrasikan nilai-nilai Islam dengan pendidikan modern, menciptakan generasi yang cerdas secara akademik dan memiliki karakter yang kuat dan berkontribusi positif bagi masyarakat. Pendidikan Muhammadiyah bertujuan menciptakan lingkungan yang mendukung pertumbuhan individu menjadi insan yang sadar akan kehadiran Allah SWT, serta menguasai ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni (An-Nilam, 2020).

Kemudian pada bidang sosial yang memperkuat demokrasi,, nilai dakwah fundamental Muhammadiyah yang ditanamkan oleh K.H Ahmad Dahlan adalah ajaran yang bersifat praktis, yang dikenal dengan sebutan teologi Al-Maun. Teologi ini menekankan pentingnya kepedulian terhadap kelompok masyarakat yang rentan seperti fakir miskin, yatim piatu, kaum dhuafa, dan mereka yang terpinggirkan. Nilai ini menjadi dasar bagi upaya meringankan penderitaan mereka dan meningkatkan taraf hidup, khususnya dalam aspek kesehatan dan sosial. Bagi K.H Ahmad

Dahlan Islam merupakan agama amal yaitu suatu agama yang mendorong umatnya untuk banyak melakukan kerja dan sesuatu yang bermanfaat (Pasha, 2000). Muhammadiyah memiliki kontribusi besar dalam bidang sosial. Pada bidang sosial peran Muhammadiyah diwujudkan dengan adanya balai pengobatan, rumah bersalin, santunan keluarga serta panti asuhan Muhammadiyah (Hapsari, 2012). Keberadaan Muhammadiyah dalam sektor kesehatan dan sosial mencerminkan semangat gotong royong dan kepedulian sosial yang menjadi inti dari *civil society* di Indonesia. Muhammadiyah bertindak sebagai penyedia layanan kesehatan dan sosial serta sebagai agen perubahan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran ini semakin diperkuat dengan keterlibatan Muhammadiyah dalam berbagai kerja sama dengan pemerintah, lembaga donor, serta organisasi internasional dalam penyediaan layanan kesehatan dan sosial bagi masyarakat luas. Keberhasilan Muhammadiyah dalam membangun jaringan layanan kesehatan dan sosial menunjukkan bahwa organisasi berbasis keagamaan dapat menjadi mitra strategis dalam pembangunan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan. Muhammadiyah telah membuktikan dirinya sebagai salah satu *civil society* yang ideal di Indonesia, karena mampu berkontribusi dalam pembangunan masyarakat melalui jalur non-pemerintah yang independen dan profesional (Nashir, 2010).

Meskipun diakui sebagai kekuatan organisasi *civil society*, Muhammadiyah tetap menghadapi tantangan internal maupun eksternal dalam menjalankan peran demokratisnya. Dikutip dari LLDIKTI Wilayah V. (2025), Muhammadiyah dalam internal menghadapi tantangan untuk menjaga netralitas lembaga, sementara para anggota dan elite tetap memiliki kebebasan berpolitik. Hal ini dapat menimbulkan tarik-menarik kepentingan. Secara eksternal, meningkatnya polarisasi politik, populisme, dan konservatisme keagamaan menuntut Muhammadiyah untuk semakin memperkuat kaderisasi dan wacana moderat agar tidak ikut terseret arus sektarian. Selain itu, tuntutan terhadap advokasi kebijakan lebih sistematis misalnya terkait ekonomi, hak minoritas, dan lingkungan yang mendorong Muhammadiyah untuk mengembangkan kapasitas riset dan jaringan yang kuat, agar peran sebagai kekuatan *civil society* tetap relevan dalam demokrasi masa kini. Dengan hal itu organisasi ini tentunya yang tidak hanya sebagai gerakan dakwah, tetapi juga berperan penguatan demokrasi melalui pendidikan, layanan sosial, dan advokasi kebijakan publik.

Kontribusi Muhammadiyah dalam Penguatan Demokrasi Indonesia

Muhammadiyah telah berperan dalam membangun demokrasi sejak masa pergerakan nasional hingga era reformasi. Sebagai organisasi Islam modernis yang menekankan pemikiran rasional dan progresif, Muhammadiyah berperan dalam membangun pemikiran politik yang demokratis, inklusif, serta berbasis pada nilai-nilai Islam yang moderat. Organisasi ini berfungsi sebagai kekuatan penyeimbang dalam dinamika politik Indonesia, tetap menjaga independensinya dari kepentingan politik praktis. Muhammadiyah telah memainkan peran strategis dalam penguatan demokrasi di Indonesia dengan mengedepankan pendidikan politik dan kesadaran demokrasi. Muhammadiyah mendorong pendidikan politik ini melalui berbagai platform seperti pengajian, seminar, dan karya ilmiah. Muhammadiyah juga mengintegrasikan nilai-nilai demokrasi ini melalui kurikulum yang menanamkan prinsip keadilan, kesetaraan, dan pentingnya penghormatan kepada hak asasi manusia (Effendy, 2003). Organisasi ini juga mengajak dan mendorong partisipasi politik yang sehat, yaitu dengan mengajak umat Islam berperan aktif dalam politik dengan berpegang prinsip Islam moderat. Muhammadiyah juga turut aktif dalam advokasi kebijakan guna kesejahteraan masyarakat, terutama untuk kelompok miskin dan marginal. Dalam hal ini, Muhammadiyah memiliki potensi besar untuk merangkul berbagai elemen masyarakat, tanpa memandang latar belakang politik, etnis, atau sosial. Hal ini karena melalui pendekatan inklusif, Muhammadiyah tidak hanya menjaga stabilitas sosial, tetapi juga mendorong partisipasi kelompok marginal dalam proses demokrasi. Tidak hanya itu, Muhammadiyah juga berperan dalam membangun budaya demokrasi yang sehat dengan menekankan pentingnya dialog, musyawarah, dan toleransi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Peran Muhammadiyah dalam penguatan demokrasi juga terletak pada kemampuannya dalam membangun masyarakat sipil yang otonom dan berbudaya.

Pemberdayaan masyarakat sipil menjadi fokus utama Muhammadiyah, dimana mereka tidak hanya meningkatkan kualitas hidup umat melalui pendidikan, kesehatan, dan layanan sosial tetapi juga melalui pendekatan kultural yang menekankan pada nilai-nilai keadilan, kebersamaan, dan toleransi. Muhammadiyah telah mendirikan berbagai sekolah, perguruan tinggi, dan rumah sakit yang tidak hanya bertujuan untuk memberikan layanan, tetapi juga untuk membentuk karakter generasi muda yang beridealisme, kritis, dan memiliki kesadaran sosial yang tinggi.

Selain dalam penguatan demokrasi, Muhammadiyah juga berkontribusi dalam menjaga stabilitas politik. Meskipun Muhammadiyah memilih untuk tidak terikat dengan partai politik tertentu, hal ini bukan berarti organisasi ini menjauh dari dunia politik. Sebaliknya, Muhammadiyah tetap berkomitmen untuk memberikan kontribusi positif dalam proses penguatan *civil society*, yang pada gilirannya berpengaruh pada stabilitas politik. Pendekatan kultural yang diusung Muhammadiyah menjadikannya lebih fokus pada pemberdayaan masyarakat. Peran aktif Muhammadiyah dalam membangun *civil society* di Indonesia terlihat dari berbagai program pemberdayaan yang mereka jalankan. Dengan memfokuskan upayanya pada penguatan komunitas dan pengembangan sumber daya manusia, Muhammadiyah berhasil menjadikan masyarakat lebih kritis dan mandiri dalam menghadapi tantangan politik. Kemampuan Muhammadiyah untuk menjaga netralitas politiknya memberikan keuntungan tersendiri. Mereka menjadi jembatan antara masyarakat dan pemerintah, di mana mereka dapat menyuarakan aspirasi masyarakat tanpa terjebak dalam konflik kepentingan politik. Hal ini berkontribusi pada stabilitas politik dengan mengurangi polarisasi yang sering terjadi di ruang publik, dengan menggunakan prinsip moderasi. Melalui pendekatan moderat, Muhammadiyah bertindak sebagai mediator dalam konflik sosial dan menyediakan layanan sosial yang mendukung kesejahteraan masyarakat.

Walaupun Muhammadiyah menghadapi tantangan perubahan zaman dan dinamika politik seperti revitalisasi kelembagaan, perubahan sosial dan budaya, teknologi dan digitalisasi, politik dinasti serta penurunan demokrasi, Muhammadiyah masih memiliki peluang besar untuk terus memperkuat kontribusinya dalam berbagai bidang dengan terus berkolaborasi dengan pemerintah dan masyarakat. Hal ini akan membantu Muhammadiyah dalam membantu menciptakan stabilitas sosial dan pemerintahan yang lebih baik untuk Indonesia. Secara keseluruhan, Muhammadiyah memiliki peran yang sangat signifikan dalam penguatan demokrasi dan stabilitas pemerintahan di Indonesia. Melalui pendidikan politik, advokasi kebijakan, dan pemberdayaan masyarakat sipil, Muhammadiyah terus berkontribusi dalam membangun demokrasi yang sehat dan berkelanjutan.

Dampak Peran dan Kontribusi Muhammadiyah bagi Demokrasi Indonesia

Dampak peran dan kontribusi Muhammadiyah bagi demokrasi Indonesia tampak pada penguatan masyarakat sipil yang mandiri, penciptaan budaya politik yang moderat dan partisipatif, serta peneguhan praktik tata kelola pemerintahan yang lebih akuntabel dan responsif terhadap kepentingan publik. Sebagai organisasi *civil society*, Muhammadiyah menjalankan fungsi pelayanan publik di bidang pendidikan, kesehatan, dan sosial yang seharusnya menjadi tugas negara, sehingga memperkuat kemandirian masyarakat dari ketergantungan pada negara. Jaringan sekolah, perguruan tinggi, rumah sakit, dan lembaga sosial Muhammadiyah menyediakan ruang publik tempat warga dapat belajar, berorganisasi, berdialog, dan mengartikulasikan kepentingan kolektif secara damai dan terstruktur.

Kehadiran ruang-ruang sosial ini mendorong terbentuknya kultur partisipatif, solidaritas, dan kepercayaan sosial yang menjadi prasyarat bagi berfungsinya demokrasi secara substantif. Dengan karakter kelembagaan yang relatif otonom dan profesional, Muhammadiyah menjadi contoh organisasi masyarakat sipil yang mampu mengambil jarak dari negara namun tetap berkontribusi pada pemecahan masalah publik. Dampak penting lain tampak pada peran Muhammadiyah dalam pendidikan politik warga yang terintegrasi dengan dakwah, pendidikan formal, dan kegiatan kaderisasi. Melalui pengajian, seminar, kurikulum pendidikan, dan literasi keislaman yang berkembang, Muhammadiyah menanamkan kesadaran hak dan kewajiban warga negara, pentingnya pemilu, serta urgensi keterlibatan aktif dalam proses politik secara damai. Pendidikan

politik ini dibingkai dalam narasi “Islam berkemajuan” yang menegaskan bahwa demokrasi kompatibel dengan nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan, bukan sekadar adopsi konsep Barat. Dampaknya, Muhammadiyah berperan dalam membentuk generasi muda yang kritis, rasional, moderat, dan memiliki kepekaan sosial, yang menjadi basis penting bagi demokrasi substansial. Budaya demokrasi yang ditekankan bukan hanya prosedural (pemilu), tetapi juga menyangkut keadilan sosial, penghormatan hak asasi manusia, serta etika bermusyawarah dalam penyelesaian perbedaan. Sebagai kekuatan moral civil society, Muhammadiyah berkontribusi terhadap demokrasi melalui fungsi kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan negara. Dalam berbagai momentum, Muhammadiyah mengambil posisi kritis-konstruktif, antara lain melalui advokasi kebijakan, dukungan terhadap lembaga antikorupsi, serta penggunaan jalur konstitusional seperti judicial review atas regulasi yang dianggap merugikan kepentingan publik. Dalam konteks demokrasi, peran advokatif ini berdampak pada penguatan mekanisme checks and balances di luar lembaga negara, karena Muhammadiyah menjalankan fungsi kontrol sosial dan moral terhadap pemerintah. Gerakan-gerakan seperti kampanye moral anti-korupsi dan dukungan terhadap lembaga penegak hukum independen menunjukkan kontribusi Muhammadiyah dalam mendorong tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif. Sikap independen dari partai politik membuat kritik Muhammadiyah memiliki bobot moral dan meningkatkan kualitas akuntabilitas demokratis. Dengan posisi sebagai oposisi moral yang tidak terseret dalam tarik-menarik politik praktis, Muhammadiyah membantu menjaga agar demokrasi tidak direduksi menjadi sekadar kompetisi elit, tetapi juga menyentuh agenda keadilan sosial dan perlindungan terhadap kelompok rentan.

Kontribusi Muhammadiyah terhadap demokrasi juga tampak pada perannya dalam menjaga stabilitas politik dan manajemen konflik sosial. Sebagai organisasi dengan basis massa luas dan citra moderat, Muhammadiyah dapat bertindak sebagai mediator dalam konflik, mendorong penyelesaian damai, dan meredam eskalasi ketegangan yang berpotensi mengancam konsolidasi demokrasi. Sikap Muhammadiyah yang menjaga jarak dari keterikatan organisasi dengan partai politik, sambil tetap membuka ruang partisipasi politik bagi warganya, memberi dampak penting bagi stabilitas demokrasi. Posisi ini menjadikan Muhammadiyah berperan sebagai kekuatan penyeimbang yang dapat mengkritik pemerintah secara konstruktif tanpa terseret kepentingan politik elektoral jangka pendek. Prinsip moderasi yang diusung Muhammadiyah seperti anti kekerasan, anti ekstremisme, dan menolak politisasi agama yang berlebihan membantu meredam polarisasi politik dan sektarianisme yang berpotensi melemahkan demokrasi. Dalam berbagai konflik sosial, Muhammadiyah juga bertindak sebagai mediator, mendorong dialog dan rekonsiliasi, sehingga berkontribusi pada terciptanya stabilitas sosial dan politik yang kondusif bagi berjalannya demokrasi.

Amal usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial menjadi kanal konkret demokratisasi dari bawah (democratization from below). Melalui peningkatan akses pendidikan dan layanan kesehatan, serta program pemberdayaan yang menargetkan kelompok miskin dan marginal, Muhammadiyah memperluas basis sosial warga yang berdaya dan mampu mengekspresikan kepentingan politiknya. Pemberdayaan ini memperkuat basis material demokrasi, karena warga yang lebih sehat, berpendidikan, dan berdaya secara ekonomi cenderung lebih mampu berpartisipasi aktif dan kritis dalam proses politik. Penggabungan dakwah dengan aksi sosial berbasis teologi al-Maun menjadikan demokrasi tidak berhenti pada prosedur formal, tetapi menyentuh dimensi keadilan sosial, pengentasan kemiskinan, dan perlindungan kelompok rentan. Dengan demikian, kontribusi Muhammadiyah tidak hanya menjaga keberlangsungan demokrasi prosedural, tetapi juga mendorong terwujudnya demokrasi yang substantif, berkeadilan, dan berkeadaban dalam konteks negara mayoritas Muslim seperti Indonesia.

Perbandingan dan Posisi Muhammadiyah dalam Konteks Civil Society Nasional

Muhammadiyah bukan hanya sebatas organisasi Masyarakat yang hadir di dalam *Civil Society*, melainkan sebuah organisasi yang telah mapan dan memiliki banyak pengalaman sepanjang lintasan Sejarah Indonesia di bidang tertentu. Organisasi yang didirikan pada tahun

1912 ini telah berkontribusi penuh sejak era perjuangan kemerdekaan Indonesia sebagai lembaga yang menyediakan aktor-aktor penting yang turut mendorong kesadaran nasional, memperkuat basis pendidikan modern, dan memainkan peran strategis dalam pembentukan karakter kebangsaan. Melalui Pembangunan sekolah-sekolah sejak 1910-1930, Muhammadiyah telah berhasil melahirkan kader-kader berkualitas yang kemudian menjadi bagian penting dalam Pembangunan dan perkembangan selanjutnya bagi organisasi ini (Alfian, 1989).

Bukan hanya di era itu saja, peran Muhammadiyah terus berlanjut secara konsisten hingga ke masa orde baru, di mana organisasi ini mengambil posisi penting sebagai kekuatan penyeimbang (*Balancing Force*) dalam kehidupan sosial-politik nasional. Di masa itu, Muhammadiyah cenderung berlawanan dengan orientasi politik orde baru dan memilih bertindak sebagai organisasi yang menyiratkan kepedulian akan hak demokrasi. Di bidang politik, Muhammadiyah berupaya menghidupkan posisi politiknya dengan membentuk Partai Politik Parmusi dengan 16 organisasi Islam lainnya sebagai respon atas dilarangnya Masyumi oleh pemerintah (Fauziah, 2019). Selain itu, organisasi ini juga berusaha mempertahankan kedudukannya sebagai organisasi yang berasas keislaman dengan memberikan respon terhadap RUU Keormasan dan Kemasyarakatan yang dinilai hanya memiliki asas tunggal, yaitu Pancasila. Sikap ini menegaskan bahwa Muhammadiyah merupakan aktor *Civil Society* yang aktif mempertahankan otonomi organisasi, kebebasan berpendapat, serta hak-hak demokratis rakyat.

Selanjutnya di era Reformasi, Muhammadiyah tidak berhenti berkembang sebagai kekuatan *Civil Society* yang memiliki pengaruh signifikan, terutama dalam kehidupan sosial. Untuk memperluas jaringan dan perannya sebagai organisasi modern yang mendorong partisipasi publik, Muhammadiyah sedikit demi sedikit menggeser posisinya yang bermula berposisi sebagai *Balancing Force*, kini berposisi sebagai *Nation-Building Force* yang turut ikut andil membangun infrastruktur Indonesia seperti sekolah, universitas, panti sosial, lembaga filantropi, serta berbagai pusat pemberdayaan masyarakat lainnya. Posisi ini berdampak pada semakin kuatnya identitas organisasi sebagai penyedia pelayanan publik yang berkomitmen meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pada titik ini, posisi Muhammadiyah dalam *civil society* menjadi menarik apabila dibandingkan dengan aktor-aktor masyarakat sipil lainnya di Indonesia. Dibandingkan dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang memiliki basis kultural-tradisional dan jaringan pesantren yang kuat, Muhammadiyah menampilkan karakter modernis dengan penekanan pada pendidikan formal, rasionalitas, dan manajemen lembaga yang terstruktur. Sementara banyak LSM di Indonesia bergerak pada isu advokasi seperti HAM atau lingkungan, Muhammadiyah menggabungkan pendekatan pelayanan sosial berskala nasional dengan kontribusi moral dan kultural bagi masyarakat. Keunggulan jaringan amal usaha menjadikan Muhammadiyah berada pada posisi unik sebagai organisasi masyarakat sipil dengan kapasitas pelayanan publik terbesar di Indonesia, melampaui banyak organisasi keagamaan dan LSM lainnya dalam hal skala, profesionalitas, dan jangkauan.

Berdasarkan perjalanan historisnya, posisi Muhammadiyah dalam *civil society* nasional tercermin sebagai aktor kunci yang memiliki pengaruh besar dalam pembentukan masyarakat Indonesia. Sejak awal abad ke-20, Muhammadiyah tidak hanya hadir sebagai organisasi keagamaan, tetapi sebagai kekuatan sosial yang berperan dalam membangun kesadaran nasional, memperluas akses pendidikan modern, dan memperkuat karakter kebangsaan. Pada masa Orde Baru, Muhammadiyah tampil sebagai *balancing force* yang menjaga otonomi organisasi serta membela ruang kebebasan sipil di tengah tekanan politik negara, sehingga mempertegas identitasnya sebagai komponen penting masyarakat sipil yang kritis dan mandiri, dan pada era Reformasi, Muhammadiyah mengembangkan diri menjadi *nation-building force* dengan berfokus pada pembangunan infrastruktur sosial masyarakat, seperti sekolah, universitas, rumah sakit, panti sosial, lembaga filantropi, dan berbagai pusat pemberdayaan. Transformasi ini memperkuat posisinya sebagai penyedia pelayanan publik yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan peningkatan kualitas hidup masyarakat luas. Dengan demikian, Muhammadiyah menempati posisi strategis dalam *civil society* nasional sebagai organisasi independen, modern, dan berkelanjutan yang berkontribusi signifikan terhadap pembangunan bangsa di berbagai bidang.

Analisis dan Interpretasi Hasil

Hasil penelitian yang dilakukan memperkuat sejumlah hasil studi sebelumnya terkait peran strategis Muhammadiyah dalam mendorong demokratisasi melalui pendidikan, pelayanan sosial, advokasi, dan pemberdayaan masyarakat. Dalam penelitian Jabbar (2007), Muhammadiyah digambarkan sebagai pelopor gerakan sosial yang membangun masyarakat mandiri melalui pendekatan keagamaan dan pendidikan. Hasil yang sama juga disampaikan oleh Aqilla et al. (2025) bahwa lembaga-lembaga pendidikan Muhammadiyah menjadi penggerak transformasi sosial. Penelitian ini juga memperluas hasil studi dari Gili Argenti (2017) yang menyoroti peran moral Muhammadiyah dalam politik nasional pasca-reformasi. Argenti menunjukkan bahwa Muhammadiyah memiliki peran sebagai kekuatan penyeimbang kekuasaan. Hasil dari penelitian ini menemukan bahwa peran tersebut tidak hanya bersifat simbolik, tetapi diwujudkan dalam program nyata seperti advokasi kebijakan, keterlibatan dalam penyelesaian konflik, serta pendidikan politik berbasis Islam. Demikian pula, peran dan kontribusi Muhammadiyah dalam layanan sosial sebagaimana dibahas oleh Muhsi et al. (2025) yang juga diperkuat dengan data terbaru mengenai jumlah fasilitas kesehatan dan sosial yang terus berkembang, serta besarnya alokasi dana yang diluncurkan untuk program-program kesejahteraan masyarakat.

Temuan dari penelitian ini kemudian menguatkan teori *civil society* yang dicetuskan oleh John A. Hall (1995), Cohen dan Arato (1992), serta Robert Hefner. Muhammadiyah menjadi contoh konkrit bagaimana organisasi keagamaan dapat menjadi aktor kunci dalam pembentukan masyarakat madani yang otonom dan demokratis. Teori Hall mengenai keberadaan *civil society* sebagai ruang sosial di luar sistem pemerintahan atau negara dan pasar dapat terlihat melalui kiprah Muhammadiyah dalam pendidikan, kesehatan, dan advokasi sosial-politik.

Secara sosial, penelitian ini menunjukkan bahwa keberadaan Muhammadiyah mampu menjembatani kebutuhan masyarakat yang tidak sepenuhnya terpenuhi oleh negara, khususnya dalam bidang pendidikan dan kesehatan. Peran ini semakin relevan di tengah ketimpangan sosial yang terus meningkat. Dengan menjangkau daerah 3T dan kelompok marginal, Muhammadiyah menunjukkan bahwa *civil society* bukan hanya simbol moral, tetapi agen perubahan nyata yang memberikan dampak langsung. Implikasi akademik dari temuan ini adalah perlunya pengkajian lebih dalam terkait peran *civil society* yang berbasis keagamaan. Muhammadiyah menawarkan kerangka baru yang memadukan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip demokrasi modern. Penelitian ini memperkaya diskursus tentang *civil society* dengan mengajukan model campuran antara spiritualitas, aksi sosial, dan advokasi demokrasi.

Kontribusi Penelitian

Kontribusi penelitian tentang peran Muhammadiyah sebagai *civil society* dalam konteks demokrasi di Indonesia sangat signifikan, baik dari segi teoritis maupun praktis. Secara teoritis, penelitian ini memperluas pemahaman tentang *civil society* dengan menjelaskan bagaimana Muhammadiyah dapat berfungsi sebagai proses demokratisasi. Hal ini dengan mengidentifikasi berbagai strategi dan program yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Studi ini menunjukkan bahwa *civil society* memiliki peranan kunci dalam memperkuat demokrasi. Selama ini, *civil society* kerap dipahami secara sempit sebagai organisasi non-pemerintah yang sekuler dan netral dari nilai-nilai keagamaan. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa organisasi keagamaan seperti Muhammadiyah justru mampu menjalankan peran yang sangat strategis dalam memperkuat nilai-nilai demokrasi, termasuk partisipasi publik, pendidikan politik, pengawasan terhadap kebijakan, dan advokasi keadilan sosial. Penelitian ini juga memberikan kerangka teoritis yang lebih kokoh untuk memahami interaksi antara nilai-nilai Islam dan praktik demokrasi, serta bagaimana organisasi berbasis agama dapat menjadi pionir dalam pembentukan masyarakat yang lebih demokratis dan adil.

Sedangkan dalam kerangka praktis, hasil penelitian ini memberikan wawasan yang berharga bagi pemerintah dalam pembuatan kebijakan. Hal tersebut karena dampak dari penelitian adalah kemampuannya untuk dijadikan acuan dalam pembuatan kebijakan publik. Ini

dapat terjadi dengan menggandeng organisasi masyarakat sipil seperti Muhammadiyah dalam pengambilan keputusan, pemerintah dapat menciptakan kebijakan yang lebih inklusif, responsif, dan reflektif terhadap kebutuhan masyarakat. Hal ini bisa dimulai dari daerah dengan mayoritas populasinya adalah anggota Muhammadiyah. Tidak hanya itu, hasil penelitian ini juga bisa dimanfaatkan pada sektor pendidikan dimana kurikulum dapat disusun untuk membahas peran organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan kesadaran demokrasi, serta menanamkan nilai-nilai partisipasi aktif di kalangan generasi muda. Penelitian ini juga bisa mendorong masyarakat untuk lebih aktif terlibat dalam proses demokrasi, karena mereka akan lebih menyadari betapa pentingnya peran *civil society* dalam menciptakan lingkungan yang lebih baik dan kondusif bagi keterlibatan publik. Pada kehidupan sosial, penelitian ini dapat berfungsi sebagai pengingat akan pentingnya kolaborasi antara organisasi keagamaan dan masyarakat luas dalam menciptakan perubahan positif. Masyarakat akan diingatkan untuk selalu aktif dalam proses demokratis, tidak hanya bergantung pada pemerintah tetapi juga berkontribusi melalui berbagai wadah *civil society*. Melalui pemahaman yang lebih mendalam tentang peran organisasi seperti Muhammadiyah, masyarakat diharapkan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam diskursus publik dan berbagai inisiatif sosial, sehingga membangun budaya demokrasi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Pada konteks yang lebih luas, kesadaran akan kontribusi Muhammadiyah dalam memajukan demokrasi di Indonesia bisa menghasilkan dorongan bagi organisasi lain guna ikut berperan aktif dalam pengembangan masyarakat sipil. Dengan demikian, penelitian ini dapat memperkaya pengetahuan akademis tentang *civil society* dan menjadi sarana untuk mendorong perubahan sosial yang lebih positif dan berkelanjutan bagi masyarakat Indonesia.

KESIMPULAN

Berdasarkan keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan yang menunjukkan bahwa Muhammadiyah mempunyai peran yang sangat penting sebagai bagian dari civil society di Indonesia. Posisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, tetapi terbentuk dari perjalanan panjang organisasi tersebut dalam membangun pendidikan, pelayanan sosial, dan ruang publik yang memberi kesempatan bagi masyarakat untuk lebih terlibat dalam kehidupan demokratis. Jejak langkah Muhammadiyah sejak awal memang tidak hanya mengarah pada dakwah keagamaan, tetapi juga pada usaha membentuk masyarakat yang lebih mandiri dan sadar akan hak-hak sosial dan politiknya.

Kontribusi Muhammadiyah dalam bidang pendidikan menjadi salah satu aspek yang paling terlihat. Melalui jaringan sekolah, universitas, dan lembaga pendidikan lainnya yang tersebar dari kota besar sampai wilayah pinggiran, Muhammadiyah secara konsisten menghasilkan lingkungan belajar yang tidak hanya berfokus pada materi akademik. Organisasi ini juga memasukkan nilai-nilai seperti kejujuran, sikap terbuka, dan kemampuan berpikir kritis yang sebenarnya merupakan fondasi penting dalam praktik demokrasi. Generasi muda yang tumbuh dalam lingkungan pendidikan seperti ini cenderung memiliki pemahaman yang lebih kuat tentang pentingnya musyawarah, dialog, serta penghormatan terhadap perbedaan pandangan.

Selain pendidikan, pelayanan sosial yang menjadi ciri utama gerakan Muhammadiyah turut memperlihatkan bagaimana nilai-nilai demokrasi diwujudkan melalui tindakan nyata. Rumah sakit, klinik kesehatan, panti asuhan, dan berbagai bentuk bantuan sosial tidak hanya hadir sebagai layanan, tetapi juga sebagai ruang pemberdayaan masyarakat. Melalui kegiatan yang bersifat langsung inilah, Muhammadiyah menunjukkan bahwa demokrasi bukan hanya soal prosedur politik seperti pemilu, tetapi juga menyangkut pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok yang lebih rentan. Pendekatan ini memperlihatkan bahwa demokrasi yang kuat memerlukan masyarakat yang sehat, berdaya, dan mampu mengekspresikan aspirasinya.

Pada sisi lain, Muhammadiyah juga memainkan peran sebagai kekuatan moral yang dapat mengimbangi pemerintah. Posisi tersebut terlihat dari cara organisasi ini menanggapi beragam kebijakan publik, baik dengan memberikan dukungan maupun kritik, tetapi tetap menjaga hubungan yang proporsional. Ketika pemerintah dinilai mengambil langkah yang tidak sesuai

dengan prinsip keadilan atau berpihak pada kepentingan kelompok tertentu, Muhammadiyah dapat menyampaikan sikap kritisnya tanpa harus terjebak dalam konflik politik praktis. Sikap semacam ini membantu menjaga ruang publik tetap sehat dan mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih transparan dan bertanggung jawab.

Dengan seluruh kontribusinya, dapat disimpulkan bahwa Muhammadiyah bukan hanya sebuah organisasi keagamaan, melainkan salah satu pilar civil society yang telah memberikan fondasi penting bagi penguatan demokrasi Indonesia. Kehadirannya menawarkan model bagaimana nilai-nilai agama, pelayanan publik, dan komitmen terhadap keadilan sosial dapat berjalan berdampingan dan memberi dampak positif pada proses demokratisasi yang lebih luas. Secara keseluruhan, Muhammadiyah memberikan contoh bahwa demokrasi dapat tumbuh kuat tidak hanya dari ruang-ruang politik formal, tetapi juga dari organisasi masyarakat yang bekerja dengan basis nilai, komitmen, dan pelayanan nyata kepada publik.

Keterbatasan Penelitian dan Rekomendasi untuk Penelitian Lanjutan

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu disadari agar tidak menimbulkan kesan seolah seluruh keadaan telah tergambarkan secara sempurna. Salah satu batasan utama terletak pada metode yang digunakan, yaitu studi literatur. Metode ini memberikan ruang yang cukup luas untuk memahami gagasan-gagasan teoritis dan temuan dari penelitian sebelumnya, tetapi di sisi lain membuat penelitian ini kurang menyentuh realitas di lapangan yang mungkin sangat beragam. Dinamika internal Muhammadiyah, variasi antar-daerah dalam pelaksanaan program, serta pengalaman langsung masyarakat sebagai penerima manfaat tidak dapat digambarkan secara utuh melalui literatur saja. Hal-hal tersebut sebenarnya bisa memberikan warna yang berbeda dalam memahami bagaimana Muhammadiyah menjalankan perannya sebagai civil society.

Keterbatasan berikutnya berkaitan dengan ruang lingkup pembahasan yang masih bertumpu pada aspek-aspek yang sering menjadi fokus kajian, seperti pendidikan, layanan sosial, dan advokasi umum. Sementara itu, perkembangan politik dan sosial belakangan ini menunjukkan banyak fenomena baru yang perlu diperhatikan. Misalnya, pergeseran pola komunikasi publik akibat media digital, meningkatnya polarisasi politik, atau perubahan orientasi generasi muda terhadap organisasi keagamaan. Tantangan-tantangan tersebut sebenarnya memiliki pengaruh besar terhadap bagaimana Muhammadiyah menyesuaikan posisinya sebagai aktor civil society, namun belum dibahas secara detail dalam penelitian ini karena keterbatasan sumber ataupun cakupan analisis.

Untuk penelitian lanjutan, diperlukan pendekatan yang lebih kaya data, seperti penelitian kualitatif lapangan yang melibatkan wawancara dengan pengurus Muhammadiyah, warga yang terlibat dalam program-programnya, maupun komunitas yang menjadi sasaran pelayanan. Penelitian berbasis studi kasus juga penting untuk melihat bagaimana peran Muhammadiyah dapat berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, mengingat konteks sosial-politik lokal dapat sangat berpengaruh. Selain itu, isu-isu kontemporer seperti peran Muhammadiyah dalam ruang digital, strategi menghadapi politik identitas, atau posisi Muhammadiyah dalam menghadapi perubahan generasi dapat menjadi arah penelitian yang relevan untuk menggambarkan peran civil society dalam kondisi yang terus berkembang.

Dengan memperluas metode dan cakupan penelitian, diharapkan studi-studi berikutnya dapat memberikan gambaran yang lebih detail dan menyeluruh tentang posisi Muhammadiyah dalam demokrasi Indonesia. Penelitian yang lebih mendalam dan berbasis data lapangan akan membantu menunjukkan bagaimana idealisme organisasi ini benar-benar diterjemahkan dalam praktik, sekaligus memberikan gambaran mengenai tantangan dan peluang yang akan dihadapi Muhammadiyah ke depan sebagai salah satu kekuatan civil society yang memiliki pengaruh besar dalam kehidupan sosial-politik Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Hall, J. A. (Ed.). (2013). *Civil society: Theory, history, comparison*. John Wiley & Sons.
Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Suara Muhammadiyah.

- Hefner, R. W. (2000). *Civil Islam: Muslims and Democratization in Indonesia*. Princeton University Press.
- Jabbar, Umar Abdul (2007) Peran Muhammadiyah dalam pemberdayaan civil society pasca reformasi. Undergraduate (S1) thesis, IAIN Walisongo.
- Argenti, G. (2017). Civil Society Dan Politik Moral Muhammadiyah. *Jurnal Politikom Indonesiana*, 2(2), 82-82.
- Muhsi, A., Asmika, H., Nurzannah. (2025). Muhammadiyah Dan Pelayanan Sosial di Bidang Kesehatan Dan Sosial Kemasyarakatan. *QOSIM: Jurnal Pendidikan, Sosial & Humaniora*, 3(1), 227-234.
- Jurdi, S. (2011). Muhammadiyah dan Gerakan Civil Society: Bergerak Membangun Kultur Madani. *Sulesana: Jurnal Wawasan Keislaman*, 6(2), 1-14.
- Aqilla, A., Azahra, P. N., Febrianti, R., Gonzales, D., Wismanto, W., & Ramashar, W. (2025). Muhammadiyah Sebagai Pelopor Gerakan Sosial dan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Budi Pekerti Agama Islam*, 3(1), 24-29.
- Prasetyo, S.A., Etwina, Z. (2024). Kontribusi Muhammadiyah dalam Penguatan Demokrasi dan Stabilitas Pemerintahan di Indonesia. *Masterpiece: Journal of Islamic Studies and Social Sciences*, 2(4), 45-56.
- Hikam, M. A. S. (1999). *Demokrasi dan civil society: Studi tentang gerakan sosial dan masyarakat sipil di Indonesia*. Penerbit Buku Kompas.
- Miles, M.B & Huberman, A.M. (1994). *Qualitative Data Analysis: An Expanded Sourcebook*. Thousand Oaks California: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Indriantoro, Nur., dan Supomo, Bambang. (2013). *Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi & Manajemen*. Yogyakarta: BPF.
- Milles, Matthew B & Huberman, A. Michael. (2014). *Analisis Data Kualitatif*. Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru. Alih Bahasa: Tjetjep Rohendi Rohidi. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia Press.
- Sirajuddin, Saleh. (2017). *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Penerbit Pustaka Ramadhan.
- Nakamura, M. (2012). *Muhammadiyah: A Reform Movement in Twentieth Century Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). The political decline of traditional ulama in Indonesia: The state, Umma and Nahdlatul Ulama. In *South East Asia Research*, 12(1), 85–112.
- Nashir, H. (2010). *Muhammadiyah Gerakan Pembaruan*. Suara Muhammadiyah.
- Hikam, M.A.S. (1996). *Demokrasi dan Civil Society*. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia
- Effendy, B. (2003). *Islam and the State in Indonesia*. Ohio University Press.
- Nakamura, M. (2012). *Muhammadiyah: A Reform Movement in Twentieth Century Indonesia*. Singapore: ISEAS Publishing.
- Fealy, G., & Bush, R. (2014). The political decline of traditional ulama in Indonesia: The state, Umma and Nahdlatul Ulama. In *South East Asia Research*, 12(1), 85–112.
- Asrida, W., Marta, A., & Hadi, S. (2021). Civil Society, Demokrasi dan Demokratisasi. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 20(2), 131-142.
<https://nakhoda.ejournal.unri.ac.id/index.php/njip/article/download/225/155/1068>
- SUGENG, A. P., & ZAYYATI, E. (2024). KONTRIBUSI MUHAMMADIYAH DALAM PENGUATAN DEMOKRASI DAN STABILITAS PEMERINTAHAN DI INDONESIA. *MASTERPIECE: JOURNAL OF ISLAMIC STUDIES AND SOCIAL SCIENCES* Учредители: CV. Minhaj Pustaka, 2(4), 175-185.
<https://journal.minhajpustaka.id/index.php/masterpiece/article/view/121>
- Setiadi, O. (2021). Muhammadiyah and Civil Society: Critical Network, Patterns of Criticism, and Challenges. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 29(2).
<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/download/11557/pdf/37693>

-
- Muhammad rifa'i., & Muhamad Jubaidi (2022). Dinamisasi muhamadiyah dan politik di Indonesia pasca reformasi. Muhcor UMY. <https://muhcor.umy.ac.id/dinamisasi-muhammadiyah-dan-politik-di-indonesia-parca-reformasi/>
- LLDIKTI Wilayah V. (2025). Muhammadiyah tegaskan netralitas politik, peran anggota dinilai dinamis. <https://lldikti5.kemdikbud.go.id/home/detailpost/muhammadiyah-tegaskan-netralitas-politik-peran-anggota-dinilai-dinamis>
- An-Nilam, Rahma Diah., Azizah, Bilqisth Nurul. (2020). Pendidikan Muhammadiyah Ditinjau dari Perspektif Filsafat Pendidikan Islam.
- Hapsari, T. (2012). Peran Muhammadiyah dalam Pelayanan Sosial di Indonesia. Jurnal Sosial dan Kemanusiaan, 7(2), 115-130.
- Muhamad, R. F. (2018). *Respon Muhammadiyah terhadap kebijakan politik Orde Baru pada bidang pendidikan ekonomi dan politik di Indonesia tahun 1995-1998* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Gunung Djati Bandung).
- Fauziyah, A. (2019). Muhammadiyah Masa Orde Baru: Sikap Politik Muhammadiyah Terhadap Kebijakan Pemerintah Orde Baru Tahun 1968-1989. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Alfian. (1989). *Muhammadiyah: The Political Behavior of a Muslim Modernist Organisation under Dutch Colonialism*. Gadjah Mada University Press.